

PEREMPUAN DAN POLITIK

*(Studi Kasus Hizbuth Tahrir Indonesia Cabang Padang Terhadap
Keterlibatan Perempuan di Parlemen)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

DASMAN ASHAR AFFANDI

01193020



JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

ABSTRAK

Dasman Ashar Affandi, 01 193 020, Perempuan dan Politik (*Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia Cabang Padang Terhadap Keterlibatan Perempuan di Parlemen*). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang. Dibimbing oleh, Pembimbing I Dr. Sri Zulchairiyah, MA, Pembimbing II Drs. Thamrin, MS.

Dalam satu dasawarsa ini permasalahan gender mendapatkan perhatian khusus dari banyak kalangan, baik kalangan akademisi, agama, dan pemerintah sendiri. Tingkat ukuran-ukuran perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dikembangkan oleh beberapa lembaga, baik lokal maupun lembaga asing seperti Bank Dunia, dengan tolak ukuran pembangunan dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kondisi perempuan dalam pembangunan masih tertinggal di beberapa bidang, semisal keterlibatan perempuan dalam politik. Hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan dikalangan akademisi, aktifis dan kalangan agama. Kalangan tersebut lantas mencoba untuk meninjau kembali hal-hal dasar yang menyebabkan kondisi tersebut. Beberapa kalangan kemudian mempertanyakan tentang ide tentang teori Developmentism sebagai tolak ukur dalam melihat kondisi perempuan, sebut saja Mansour Faqih dalam bukunya "*Perempuan dan Pembangunan*" dan "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Beberapa kalangan mencoba untuk mendekonstruksi ulang tentang hal-hal dasar yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan kondisi tersebut, sebut saja Aminah Wadud dan kalangan gender, yang mencoba dalam wacana yang dikembangkannya untuk menafsirkan ulang tentang *Fiqh* perempuan. Dan ada juga kalangan yang mencoba melihat permasalahan perempuan bukan dari hal-hal tersebut, akan tetapi memandang permasalahan perempuan yang selama ini terjadi adalah disebabkan karena penerapan sebuah sistem yang sudah sangat jauh dari nilai-nilai agama, dimana nilai-nilai *Azali* atau ketuhanan adalah jalan keluar dari masalah tersebut, mereka (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) menawarkan sebuah konsep Islam sebagai usaha untuk memperbaiki ketimpangan selama ini. Mereka menawarkan konsep penerapan *syariah Islam* dengan penegakan sistem pemerintahan *Daulah Islamiyah* atau *Khilafah* (Negara Islam) sebagai sebuah sistem yang dapat menaungi terlaksananya *syariah Islam*. Usaha-usaha kalangan gender dianggap mencapai tahap kemajuan dengan diterapkannya quota 30% perempuan diparlemen, yang usaha tersebut merupakan langkah untuk mengeluarkan perempuan dari kondisi marjinalnya selama ini. Akan tetapi menurut Hizbut Tahrir, seperti yang dikatakan juru bicaranya Ismail Yusanto, penerapan hal tersebut bukanlah jalan keluar bagi permasalahan perempuan selama ini, ini bukan masalah jumlah, akan tetapi sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada setiap warga negara yang dinaunginya.

Dengan permasalahan tersebut lantas penelitian ini mencoba untuk menganalisa mengapa Hizbut Tahrir menolak keterlibatan perempuan dalam parlemen, dan mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam politik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dasawarsa terakhir pembicaraan mengenai isu-isu kesetaraan gender mulai muncul kepermukaan di Indonesia. Pembahasannya kemudian dianggap sebagai pelengkap bagi analisis kritis dalam perkembangan ilmu sosial.¹ Dimana isu tentang feminisme dan pembahasan seputar hak-hak perempuan dan permasalahannya mulai diperhatikan.

Mayoritas budaya di Indonesia merupakan budaya yang Patriarkhi. Model budaya dimana pria mendapatkan posisi yang lebih baik dalam masyarakat dibandingkan wanita.² Walaupun ada budaya nasional yang menganut sistem budaya yang matrilineal seperti di daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau nya. Dengan model budaya yang patriarkhat tersebut hak-hak perempuan Indonesia terkadang terpinggirkan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat dengan pola hidup yang modern. Misalnya, dalam rumah tangga anak laki-laki cenderung menjadi prioritas utama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan anak perempuan. Sedangkan ditengah masyarakat stereotipe perempuan sebagai jenis kelamin dengan beberapa keterbatasan fisik, kemudian secara langsung maupun tidak

¹ Lihat dalam Mansour Fakih "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*", Yogyakarta: 2007, hlm.: xii.

² Lihat Siti Ruhaini Dzuhayatin. "*Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*", Yogyakarta: 2002. hlm.: 9-20.

langsung membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah-ranah publik, seperti jabatan politis.

Hak-hak perempuan dalam kerangka budaya yang patriarkhat tersebut terbatas dan dibatasi secara normatif. Norma-norma yang dibentuk oleh model budaya patriarki dan diyakini oleh masyarakat sebagai landasan bagi aktivitas keseharian mereka, memberikan keterbatasan bagi peran dan aktivitas keseharian perempuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai atau norma di dalam masyarakat telah menetapkan bahwa sudah kodratnya perempuan merupakan “ratu dan pengurus rumah tangga”, sehingga pikiran-pikiran untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di luar rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi kodrat dan mengada-ada.³ Hal tersebut langsung ataupun tidak langsung menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan berpartisipasi dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan.⁴ Hal ini antara lain disebabkan karena lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung, untuk membiarkan perempuan berpartisipasi dalam politik dan penentu keputusan nasional, dan adanya kelembagaan yang masih terus membatasi perempuan pada kekuasaan marginal.

Di dalam masyarakat agraris paling tidak ditemukan tiga pandangan anggapan mengenai hubungan laki-laki—perempuan di dalam masyarakat agraris⁵, (1) kedudukan pria-wanita itu “berbeda tetapi setara”. Di dalam

³ Tjandraningsih Indrasari. “Mengidentifikasi Persoalan Perempuan”. Jurnal Analisis Sosial, Edisi 4 November. AKATIGA, 1996, hlm. 11-13.

⁴ Endang Lestari Hastuti. “Hambatan Sosial Budaya dalam Pengarusutamaan Gender di Indonesia”. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/8\)%20soca-endang-hambatan%20sosbud\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/8)%20soca-endang-hambatan%20sosbud(1).pdf). Diambil pada tgl. 20-Desember-2008

⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang penolakan Hizbut Tahrir terhadap keterlibatan perempuan dalam parlemen dan lembaga eksekutif di Indonesia. Serta bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam politik dan lembaga perwakilan dalam perspektif Hizbut Tahrir. Ditemukan bahwa dalam pemahaman Hizbut Tahrir keterlibatan setiap muslim dalam politik (parlemen dan eksekutif), menurut mereka, haruslah dilihat dari kacamata *syariah* Islam (hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW). Dimana setiap muslim mempunyai hak yang sama dalam politik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Walau demikian memang ada pembatasan hak perempuan untuk menjabat dalam posisi kepemimpinan, yang hal tersebut mereka pandang sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulNya Muhammad SAW. Yang bila dilanggar merupakan sebuah pengingkaran terhadap Allah SWT. Oleh karena itu perempuan dalam pandangan Hizbut Tahrir tidak boleh menjadi pemimpin dalam sebuah negara (semisal Presiden).

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa politik adalah hak dan kewajiban setiap muslim dalam rangka menyerukan kepada yang *haq* dan melarang kepada yang *batil*. Maka Hizbut Tahrir meyakini bahwa hak politik tidak hanya terbatas bagi kaum laki-laki saja tetapi kewajiban seluruh ummat muslim. Penting nya Daulah Islamiyah sebagai sebuah sistem yang dengannya Syariah Islam dapat berkembang dimuka bumi dan nantinya akan menciptakan kemaslahatan bagi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU METODE

- Danim, Sudarwan. 2002. *"Menjadi Peneliti Kualitatif"*. Pustaka Setia; Bandung.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *"Penelitian Kualitatif ; Dasar-dasar dan Aplikasi"*. Y A 3; Malang.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *"Metodologi Penelitian Sosial"*. Bumi Aksara; Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2002. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Singarimbun, Masri. 1989. *"Metode Penelitian Survey"*. LP3S; Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Alfabeta; Bandung.
- Yin, Robert K. 2000. *"Studi Kasus."* Remaja Rosda Karya; Bandung.

BUKU

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1995. Departemen Agama RI. Terj. Yayasan Toha Pratama; Semarang.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2007. *"Pembentukan Partai Politik Islam"*. Terj. oleh Zakaria, Labib dkk. Al Azhar; Bogor.
- An Nabhani, Taqiyuddin, 2007. *"Mafahim Hizbut Tahrir"*. Terj. Abdullah. Al Azhar; Bogor.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *"Daulah Islam"*. Umar Faruq dkk. Al Azhar Press; Bogor.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2008. *"Stuktur Negara Khilafah; Pemerintahan dan Administrasi"*. Terj. oleh Yahya R. HTI Press; Jakarta.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2007. *"Syaksiyah Islam"*. Terj. oleh Zakia Ahmad. HTI Press; Jakarta.